

Economic Development Planning in Medan City

Perencanaan Pembangunan Ekonomi di Kota Medan

Salwa Fadhilah Haya ¹, Risfa Dwi Andini ², Sultan Rasy Nasyaa ³, Iyas Alwi Siregar ⁴, Sari Wulandari ⁵

^{1,2,3,4,5} Fakultas Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

email : ¹ salwafadhilahhaya@gmail.com, ² risfadwiandini@gmail.com, ³ sultanrasy@gmail.com, ⁴

iyasalwisiregar@gmail.com, ⁵ sariwulandari@umnaw.ac.id

How to Cite :

Haya, S. F., Andini, R. D., Nasyaa, S. R., Siregar, I. A., Wulandari, S. (2022). Economic Development Planning in Medan City. JURNAL EMBA REVIEW, 2 (2). DOI: <https://doi.org/10.53697/emba.v2i2>

ARTICLE HISTORY

Received [09 September 2022]

Revised [30 September 2022]

Accepted [08 Desember 2022]

KEYWORDS

Planning, Development,
Economic Development,

This is an open access article under
the [CC-BY-SA](#) license



ABSTRAK

Pembangunan ekonomi pada suatu daerah harus melalui beberapa rencana dan target baik jangka panjang maupun jangka pendek. Proses menuju pada realisasi beberapa target tersebut berguna untuk mengondisikan kapasitas peningkatan perekonomian bagi masyarakat. Salah satu ciri-ciri masyarakat yang telah beriringan dengan perkembangan perekonomian ditandai dengan meluasnya penggunaan teknologi serta perubahan ke arah yang lebih positif pada pola pikir masyarakat hingga instansi kelembagaan. Metode penelitian yang dipergunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah tipe deskriptif dengan tujuan mendapatkan representasi proyeksi dari sebuah partisipasi dan mekanisme regulasi procedural masyarakat ketika proses penyusunan RPJMD di Kota Medan dari tahun 2010 hingga tahun 2025. Langkah analisa yang digunakan dengan menggunakan data sekunder atau data pendukung berupa himpunan informasi mengenai hasil wawancara dengan responden serta memberikan sajian yang tepat dengan paparan matriks disertai dengan pemaparannya yang telah ditampilkan oleh peneliti. Ragam informan atau responden yang dijadikan sebagai himpunan informasi dalam penelitian ini melibatkan berbagai unsur seperti organisasi kemasyarakatan, elemen dari pemerintahan Kota Medan hingga akademisi yang bernaungan dibawah perguruan tinggi hingga media massa dan unsur utamanya adalah DPRD Kota Medan. Proses penyusunan hasil penelitian ini berorientasi pada proses tanya jawab atau wawancara dengan menerapkan langkah analisis kualitatif dengan tujuan untuk mengkritisi berbagai fenomena di dalam jalannya proses penyusunan laporan dan penyelidikan fenomena mengenai topik penelitian. Lanjutan proses tersebut adalah teknik analisis data dengan menggunakan penafsiran pada logika ditunjang dengan data yang telah dihimpun sebelumnya. Hasil Penelitian ini adalah Dalam perencanaan pembangunan, Kota Medan memiliki tantangan dengan harus menangani daerah seluas 265,10 km², dengan perkiraan kepadatan penduduk sebanyak 9.836,56 jiwa/km² pada tahun 2025. Pertambahan jumlah penduduk ini dapat menjadi hambatan dalam menangani perencanaan pembangunan, namun ini juga menjadi peluang jika pemerintah dapat memanfaatkan pertambahan penduduk ini. Untuk pertumbuhan penduduk sendiri pada tahun 2025 terjadi penurunan, yang dimana pada tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan sebesar 1,03 menjadi 0,94 % pada tahun 2025.

ABSTRACT

Economic development in an area must go through several plans and targets

both long term and short term. The process leading to the realization of some of these targets is useful for conditioning the capacity for increasing the economy of the community. One of the characteristics of society that has gone hand in hand with economic development is marked by the widespread use of technology and changes in a more positive direction from the mindset of the people to institutional institutions. The research method used as an analytical tool in this study is a descriptive type with the aim of obtaining a projected representation of a participation and procedural regulatory mechanism in the community during the process of preparing the RPJMD in Medan City from 2010 to 2025. The analytical steps used are secondary data or data. supporting information in the form of a collection of information regarding the results of interviews with respondents as well as providing an appropriate presentation with an explanation of the matrix accompanied by the presentation that has been displayed by the researcher. The variety of informants or respondents used as a collection of information in this study involved various elements such as social organizations, elements from the Medan city government to academics under the auspices of universities to the mass media and the main element is the Medan City DPRD. The process of compiling the results of this research is oriented towards a question and answer process or interviews by applying qualitative analysis steps with the aim of criticizing various phenomena in the process of preparing reports and investigating phenomena regarding the research topic. The continuation of the process is a data analysis technique using logical interpretation supported by previously collected data. The results of this study are that in development planning, Medan City has a challenge by having to handle an area of 265.10 km², with an estimated population density of 9,836.56 people/km² in 2025. This population increase can be an obstacle in handling development planning,, however This is also an opportunity if the government can take advantage of this population increase. For population growth itself in 2025 there will be a decline, which in 2020 is expected to grow by 1.03 to 0.94% in 2025.

PENDAHULUAN

Posisi Kota Medan menjadi salah satu kota yang memiliki banyak potensi yang telah dikenal oleh kalangan luas juga berperan sebagai pusat pemerintahan hingga predikay pusat pembangunan dan pertumbuhan perekonomian tepatnya di Provinsi Sumatera Utara. Kota Medan memiliki kewajiban untuk dituntut terus memberikan fasilitas sarana dan prasaran serta berbagai entitas yang berhubungan dengan tujuan sebuah wilayah untuk menjadi kota dengan idelalis yang tinggi dalam melayani masyarakat. Kebutuhan masyarakat di wilayah Sumatera Utara juga sejatinya dirasakan dan didukung oleh kapabilitas pusat pemerintahan. Ketersediaan sarana hingga infrastruktur yang memadai mampu menjadi salah satu pendukung dalam terealisasinya sebuah capaian target dalam siklus pertumbuhan perekonomian. Paparan tersebut yang menarik perhatian dari penulis untuk menyusun sebuah laporan dan melakukan pengkajian mengenai perencanaan pembangunan yang akan ditargetkan oleh Kota Medan. Kegiatan pembangunan yang secara khusus diorientasikan pada aspek perekonomian menjadi target utama yang harus diselesaikan oleh keseluruhan kalangan pada kegiatan pembangunan. Hal ini berhubungan dengan dampak yang bisa dirasakan dari sebuah pembangunan akan membawa pada kesejahteraan masyarakat. Usaha-usaha yang berkaitan dengan pemenuhan dan pemerataan dari *feedback* pembangunan bagi masyarakat harus dirasakan secara merata. Orientasi utama dari dampak pembangunan secara global harus berdampak besar pada berbagai permasalahan sosial yang masih marak terjadi di beberapa wilayah di Indonesia seperti kemerosotan minat pada pendidikan, pengentasan kemiskinan, meningkatnya pengangguran hingga mengurangi adanya ketimpangan atau kesenjangan perekonomian di lingkup masyarakat (Sirojuzilam, 2008).

Urgensi dari pembangunan perekonomian ini sebagai wujud dari adanya negara yang melangkah maju untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakatnya dengan lebih baik. Pembangunan menjadi salah satu cita-cita bangsa dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan pada kebutuhan serta infrastruktur juga mendukung adanya korelasi antara beberapa pihak yang memiliki kewenangan dalam sector perekonomian ini di masing-masing wilayah. Pemerintah harus memperhatikan dengan baik kebutuhan masyarakat secara merata sehingga proses yang dilalui akan tertata dan terencana dengan sistematis. Keberadaan fungsi pembangunan ini akan melibatkan berbagai pihak dan dampak dari pembangunan tidak bisa dipisahkan dengan berbagai unsur atau elemen lain yang memiliki peranan penting. Proses yang dituju dalam sebuah pembangunan ini berhubungan dengan harapan awal sebuah pembangunan dan tujuan yang akan dicapai dengan baik. Disisi lain, perencanaan pada sebuah pembangunan menjadi interpretasi dari sebuah harapan yang direalisasikan dalam jangka panjang. Proses menyusun sebuah rencana juga harus mempertimbangkan berbagai aspek.

Proses penyusunan rencana ini diperhitungkan dengan menyusun berbagai asumsi yang akan dikendalikan serta memiliki proyeksi yang cukup baik dalam pencapaian sebuah instansi kelembagaan. Dalam proses penyusunannya juga memperhatikan beberapa koordinasi pada kegiatan yang telah dilaksanakan. Para ahli telah melakukan perumusan serta perhitungan untuk menyatakan bahwa proses perencanaan sangat rentan dengan kekeliruan sehingga perlu adanya pihak lain yang membantu proses penyusunan perencanaan dengan lebih relevan yang harus diperhitungkan matang-matang. Hakikat definisi dari pembangunan perekonomian sebagai proses panjang yang dapat menjadi factor pendukung adanya kemunculan GNP secara hitungan perkapita atau didefinisikan sebagai pendapatan masyarakat yang terus mengalami peningkatan. Beberapa sifat utama dari peningkatan pendapatan adalah munculnya proses yang mengakibatkan perubahan secara terus menerus, kenaikan pendapatan perkapita masyarakat yang terus meningkat hingga usaha atau upaya yang dapat mendorong peningkatan pendapatan perkapita bagi masyarakat. Pandangan terhadap pembangunan perekonomian sebagai unsur media untuk meningkatkan pendapatan harus relevan dengan kebutuhan atau pertumbuhan dari PDB (produk domestik bruto).

Semenjak direalisasikannya otonomi daerah sebagai kebijakan pemerintah yang secara leluasa memiliki wewenang untuk meningkatkan pendapatan serta perekonomian daerah, beberapa daerah memiliki kebebasan dan kewenangan dalam mengatur dan mengembangkan potensi wilayahnya selaras dengan kebutuhan masyarakat setempat (Nehen, 2010). Disisi lain, mayoritas daerah mengalami proses yang berbeda dengan tujuan yang sama untuk meningkatkan pembangunan perekonomian. Perbedaan waktu di setiap wilayah dalam mengembangkan sebuah perencanaan pembangunan perekonomian disebabkan oleh berbagai hal. Beberapa fenomena tersebut menimbulkan adanya disparitas sehingga menimbulkan kesenjangan antar wilayah. Pemerintah pusat Kota Medan sendiri memiliki 21 kecamatan yang keseluruhannya memiliki wewenang masing-masing dalam mengelola daerahnya. Hal ini dapat dilihat dalam data berikut.

Tabel 1. IHK dan Tingkat Inflasi Kota Medan Juli 2022, Tahun Kalender 2022, dan Tahun ke Tahun Menurut Kelompok Pengeluaran COICOP (2018=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Juli 2021	IHK Desember 2021	IHK Juli 2022	Tingkat Inflasi Juli 2022 (%)	Tingkat Inflasi Tahun Kalender 2022 (%)	Tingkat Inflasi Tahun ke Tahun (%)	Andil Inflasi Juli 2022 (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Umum (Headline)	104,82	105,92	110,54	0,27	4,36	5,46	0,27
Makanan, minuman dan tembakau	105,22	107,20	115,80	-0,23	8,02	10,06	-0,0763
Pakaian dan alas kaki	109,27	110,22	112,85	0,622	2,39	3,28	0,0336
Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga	102,59	103,17	104,10	0,23	0,90	1,47	0,0435
Perlengkapan peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga	109,50	110,04	114,86	-0,44	4,38	4,89	-0,0243
Kesehatan	105,17	105,49	106,19	0,00	0,66	0,97	0
Transportasi	103,22	104,88	112,25	1,57	7,03	8,75	0,1588
Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan	101,42	101,38	101,57	0,38	0,19	0,15	0,0167
Rekreasi, olahraga, dan budaya	102,71	102,18	105,67	2,00	3,42	2,88	0,0338
Pendidikan	101,25	101,25	101,25	0,00	0,00	0,00	0
Penyediaan makanan dan minuman/restoran	105,60	106,60	108,67	0,05	1,94	2,91	0,0037
Perawatan pribadi dan jasa lainnya	11,24	111,99	118,06	1,31	5,42	6,13	0,0774

(Sumber : Badan Pusat Statistik 2022)

Keterangan dari pemaparan tabel berikut:

- 1) Presentase perubahan IHK dalam Bulan Juli tahun 2022 terhadap IHK pada bulan Juni tahun 2022
- 2) Presentase perubahan IHK dalam Bulan Juli tahun 2022 terhadap IHK pada bulan Desember tahun 2021
- 3) Presentase perubahan IHK dalam Bulan Juli tahun 2022 terhadap IHK pada bulan Juli tahun 2021

Fenomena inflasi menjadi salah satu tahapan utama dalam meningkatkan harga yang menunjukkan klasifikasi tujuh kelompok pada proses pengeluaran. Dari ketujuh kelompok tersebut meliputi pakaian serta alas kaki sebesar 0,62%, kelompok olahraga hingga rekreasi serta budaya sebesar 2%, kelompok transportasi atau kendaraan sebesar 1,57%, kelompok pada listrik hingga air dan perumahan bahan bakar dalam rumah tangga sebesar 0,23%, jasa keuangan pada sebuah instansi sebesar 0,38%, golongan yang menunjang makanan dan persediannya sebesar 0,05%, keberadaan tembakau sebesar -0,23%, kebutuhan rumah tangga dan pemeliharaannya senilai -0,44% yang disebut sebagai penurunan harga. Disisi lain penunjang dalam klasifikasi dua kelompok pengeluaran adalah pada sistem pendidikan dan kesehatan. Komoditas lain yang mendukung adanya inflasi di Bulan Juli tahun 2022 adalah beberapa komoditas sayur seperti cabai hijau, jengkol, cabai rawit hingga buah naga dan seragam sekolah anak. Selain itu, komoditas pendukung lainnya seperti transportasi udara, tarif pada potong rambut bagi pria dan anak serta kebutuhan mandi yakni sabun mandi. Disisi lain, komoditas yang mendukung adanya fenomena turun harga antara lain kembang kol, kecambah, jeruk nipis, ikan, ayam ras hingga sabun cuci piring dan minyak goreng.

Tepatnya Bulan Juli tahun 2022, 11 golongan yang dikategorikan sebagai pengeluaran tersebut menyumbangkan proses inflasi dalam sebuah fenomena deflasi dari dua kelompok atau golongan lain yang tidak menyumbangkan inflasi maupun deflasi terhadap fenomena inflasi di Kota Medan. Pada sebuah kelompok pengeluaran tentunya juga menyumbangkan beberapa rangkaian pada andil inflasi seperti pada kelompok restoran atau penyedia makanan dengan jumlah 0,0037%, kelompok yang dikategorikan pada pemeliharaan rutin hingga peralatan dalam lingkup rumah tangga senilai 0,0243%, kelompok yang tergolong pada pakaian serta alas kaki sebesar 0,0336% dan kelompok kendaraan mencapai 0,1588%. Selain itu, terdapat kelompok jasa keuangan sebesar 0,0167% hingga kelompok rekreasi dan budaya mencapai 0,338%. Sementara itu, beberapa kelompok atau golongan lainnya sama sekali tidak menimbulkan fenomena inflasi maupun deflasi terhadap inflasi yang umum di Kota Medan yakni golongan pendidikan dan golongan kesehatan. Secara statistika, pada Bulan Januari hingga Juli tahun 2022, inflasi mencapai 4,36% serta dari Bulan Juni 2022 terhadap Bulan Juli tahun 2021 sebesar 5,46%. Dalam periode yang sama di tahun 2021 serta tahun 2020 masing-masing inflasi mencapai 0,64% serta 0,36%. Inflasi dari Bulan Juli tahun 2021 terhadap Bulan Juli tahun 2020 terhadap inflasi Bulan Juli tahun 2019 menunjukkan capaian angka sebesar 2,04% serta -0,72%.

Sejauh ini kendala yang dirasakan dalam fenomena serta proses perencanaan pembangunan perekonomian berhubungan dengan procedural secara mekanis di Kota Medan sendiri yang tidak dilaksanakan dengan baik. Pembatasan yang terjadi pada sector keuangan bagi kelangsungan pembangunan daerah juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kendala yang sangat kompleks. Peranan dari masing-masing pemangku kepentingan atau *stakeholders* juga berhubungan penuh dengan proses rencana pembangunan yang saling mempengaruhi. Hal ini mengingat adanya pihak lain yang terlibat seperti pihak pemerintah dan pihak swasta dan kebutuhan dalam menampung berbagai aspirasi serta saran membangun dari pihak lain.

LANDASAN TEORI

Identifikasi yang menjabarkan keempat model pada sebuah perencanaan perkotaan sekaligus pada prinsip-prinsip yang diimplementasikan pada sebuah perencanaan secara universal (Berry, 1973), yakni:

- a. *Allocative trend-modifying* yang diketahui sebagai sebuah rencana dengan orientasi pada masa depan serta proses penyusunannya disesuaikan dengan kecenderungan atau kemungkinan yang saat ini terjadi. Upaya ini untuk mengatasi berbagai problematika yang telah ada pada penafsiran masa depan.

- b. *Ameliorative problem* yang dipahami sebagai upaya perencanaan dengan proses penyusunannya didasarkan pada problematika yang telah tersedia dengan kecenderungan yang hanya diorientasikan pada pada utamanya jangka pendek.
- c. *Normative good oriented planning* sebagai sebuah rencana yang diorientasikan pada masa depan dengan identifikasi secara langsung pada beberapa tujuan dalam jangka panjang serta sebuah negara. Hal ini ditafsirkan sesuai dengan bentuk negara yang bersifat sentralisasi.
- d. *Exploitative opportunity* sebagai sebuah upaya perencanaan yang tidak memiliki kepentingan dalam proses identifikasi berbagai problematika dengan mendatangkan sebuah peluang baru. Masyarakat dalam hal ini sekaligus swasta memiliki tujuan dalam mengoptimalkan sebuah laba dengan sedikit yang mempertimbangkan masa depan.

Konsep yang telah disusun dalam model upaya peencanaan tersebut merupakan tindakan lingkup masyarakat maupun instansi yang secara nyata difungsikan dalam pengembangan sebuah strategi yang maksimal ketika upaya perencanaan dijadikan sebagai media dalam mencapai sebuah tujuan. Hakikat dari perencanaan sebagai metode rasional yang digunakan untuk menyajikan masa depan lebih terstruktur. Sementara itu, urgensi dari sebuah perencanaan harus disesuaikan dengan proses yang dapat menentukan sebuah pencapaian di masa mendatang serta melakukan penetapan pada beberapa proses yang melibatkan pencapaian.

Definisi Pembangunan

Definisi utama dari sebuah pembangunan sebagai usaha yang berkelanjutan dalam menyusun sebuah kondisi yang disesuaikan dengan keadaan diiringi dengan hal alternative yang berguna bagi seluruh masyarakat sekaligus penyaluran aspira yang humanistic. Secara global, sebuah pembangunan ditujukan dalam perwujudan bangsa hingga kemandirian serta kesejahteraan dari sisi lahir batin yang dijadikan urgensi pada keseluruhan proses pembangunan. Upaya dalam memjukan berbagai upaya kesejahteraan juga harus diikuti dengan relevansi sebuah perekonomian yang cepat sekaligus berkembang. Pembangunan yang menurut pendapat Rogers sebagai proses berubahnya sesuatu menjadi lebih idela dalam hierarki sistem sosial dan perekonomian sebagai kehendak yang melibatkan bangsa. Sementara itu, pendapat Rostow pada pembangunan dipahami sebagai proses yang digerakkan dengan garis linier sebagai representasi dari masyarakat yang kurang mendapat perhatian dan kemajuan pembangunan sebuah negara. Awal pembangunan tersebut digunakan sebagai replikasi sebuah pertumbuhan dalam sector ekonomi namun hal ini menjadi landasan utama sebagai produktivitas sebuah negara maupun masyarakat terhitung setiap tahunnya.

Definisi Pembangunan Ekonomi

Pembangunan dalam sector ekonomi sebagai jalannya proses yang didukung dengan adanya sebuah pendapatan secara perkapita sebuah lingkup masyarakat mengalami peningkatan pada jangka panjang disertai dengan adanya revolusi yang menunjang kegiatan masyarakat seperti halnya pola pikir, lembaga maupun instansi dan teknologi. Pendapat Todaro (2000) mengenai pembangunan ekonomi sebagai proses yang didukung dengan adanya sebuah peningkatan dalam perkapita secara nyata yang diikuti kesertaan seluruh penduduk negara dalam jangka waktu yang lama dan diiringi dengan sebuah rekonstruksi sistem pada instansi.

Tantangan Pembangunan Ekonomi

Dalam perekonomian, tentunya ditemui beberapa hambatan yang dapat memberikan akses lebih sulit pada proses pelaksanaan, yakni:

- a. Perkembangan sebuah teknologi
- b. Adanya konflik yang terjadi diantara penduduk
- c. Terdapat kerusakan pada lingkungan
- d. Perkembangan yang terjadi dalam lingkungan global
- e. Adanya konflik yang terjadi antar sebuah negara

Faktor Pendukung Pembangunan Ekonomi

Suatu negara dapat menjadikan perekonomian menjadi pilar utama dalam sebuah pembangunan. Beberapa factor yang mendukung antara lain:

- a. SDM atau sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas
- b. Adanya perdagangan dalam sector Internasional
- c. Nominal kurs mata uang
- d. Sebuah investasi

Hambatan dalam Pembangunan Ekonomi

Pada sebuah sekelompok penduduk dengan klasifikasi kualitas pendidikan yang rendah, maka perekonomian yang terjadi memiliki sifat dualistic. Hal ini disertai dengan perkembangan yang secara nyata mendingir sebuah sistem maupun melakukan hambatan pada sebuah sistem pembangunan. Kapasitas yang lumayan luas bagi sebuah negara dalam melakukan akses untuk menghasilkan suatu produk dengan bernilai tinggi.

Sifat Perekonomi Dualistik

Dalam model perekonomian dualistic tentu memunculkan sebuah hambatan yang disebabkan oleh tingkat produktivitas pada sebuah kinerja sanga rendah dan disertai dengan pengadaan yang sangat terbatas pada sebuah perubahan. Hal paling rawan disertai dengan adanya dualism teknologi maupun sosial yang mampu mengubah procedural mekanisme pasar sekaligus sumber daya yang tersedia tidak dimanfaatkan dengan efisien.

Hierarki Pembentukan Modal Rendah

Pada proses pembentukan modal yang cukup rendah juga menjadi sebuah hambatan dalam pembangunan perekonomian. Pada pembentukan modal di beberapa negara juga memiliki perkembangan yang disebut sebagai *visicious cycle*. Kadar produktivitas dalam hal ini cukup rendah yang disebabkan dengan adanya klasifikasi pendapatan rendah. Pendapatan yang dikategorikan rendah seringkali menjadi sebab dari *low investment* hingga *low saving* pada sebuah pembentukan modal. Klasifikasi pendapatan yang rendah juga menjadi sebab dari turunnya tabungan yang akan menjadi penyebab lemahnya pembentukan modal hingga terus menerus dan tidak berujung pangkal.

Hierarki Ekspor Berupa Bahan Mentah

Pada kegiatan ekspor sebuah negara yang masih dalam klasifikasi negara berkembang menjadi istilah *engine of growth* yang memiliki sifat industri serta mendorong adanya perekonomian dualism sehingga tidak menjadi pendorong utama dalam perkembangan perekonomian yang berkelanjutan. Adanya pendapat dari Publish dan Singer yang menyatakan bahwa dalam jangka panjang, konsepsi daya tukar setiap barang-barang yang diperjalkan oleh negara berkembang maupun maju akan bertambah rendah dan mampu menjadi penyebab ruginya sebuah negara berkembang.

Sebab Akibat dari Kumulatif

Sirkuler yang menjabarkan mengenai proses sebab akibat sebagai kumulatif juga menampilkan bahwa pembangunan pada sebuah daerah yang miskin menjadi akibat dari pembangunan di wilayah maju. Kemunculan gap antara daerah berkembang maupun miskin dengan negara maju juga mampu menghambat sebuah pembangunan yang dikenal sebagai *backwash effect*. Beberapa factor dari *backwash effect* antara lain:

- a. Perpindahan yang terjadi oleh daerah miskin ke daerah yang maju.

- b. Adanya corak dalam pengaliran industri yang terjadi di wilayah maju didominasi secara universal sehingga menyebabkan sebuah perlambatan proses industri di wilayah miskin.

Dalam klasifikasi factor keberhasilan dalam program perencanaan yang merujuk pada beberapa factor yang menunjang secara integral dalam sebuah kalangan yang memiliki kepentingan dengan pihak terlibat baik secara internal maupun eksternal. Factor lingkungan menjadi salah satu pemicu yang menyebabkan terdapat kerancuan dalam sector sosial maupun politik, ekonomi hingga budaya. Hal ini juga sesuai dengan konsepsi lingkungan yang mendukung beberapa pengaruh kuat bagi keselarasan sistem maupun perencanaan pembangunan. Factor yang telah diklasifikasi secara rinci mengenai factor internal dan factor eksternal juga menjadi salah satu pemicu yang sangat besar bagi keberlangsungan sebuah pengaruh global yang membawa dampak besar bagi ruang lingkup internasional maupun nasional. Sedangkan dalam factor internal sendiri memiliki dampak yang besar dan berasal dari sebuah perencanaan wilayah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan sebagai langkah untuk melakukan kajian analisis pada penelitian ini berupa penelitian kualitatif dengan melakukan kegiatan pada proses interpretasi serta penggambaran dan proses mengetahui fenomena yang terjadi ketika proses penyusunan dilakukan secara objektif. Sugiyono (2015, p. 209) memaparkan bahwasanya dalam konteks metode penelitian kualitatif ini berlandaskan pada situasi sebuah objek yang dianalisis secara alamiah. Dari pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa dalam esensi sebuah penelitian kualitatif ini menjadi salah satu proses yang berhubungan dengan penelitian dengan sifat alamiah dan spontan serta menggunakan pendekatan studi kasus. Secara intensif, penelitian ini menekankan pada objek tersebut sehingga hasil penelitian yang diharapkan sesuai dengan studi kasus yang dikaji. Data studi kasus dalam penelitian ini berupa pengkajian yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik Kota Medan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini telah dilakukan sesuai dengan procedural dari topik penelitian yang dikaji secara mendalam dengan diintegrasikan pada teori yang digunakan. Berdasarkan hasil analisis, topik pembahasan akan diklasifikasikan berdasarkan 3 pokok bahasan yang utama. Tindakan ini digunakan untuk menganalisis factor yang mendukung serta menghambat proses pembangunan di Kota Medan hingga realisasi dari perencanaan yang telah dicanangkan oleh pihak pemerintahan Kota Medan bagi pihak-pihak yang berpartisipasi di dalamnya serta tindakan yang berorientasi pada upaya dari instansi perencanaan pembangunan daerah ketika akan melaksanakan kegiatan rencana dari pembangunan secara partisipatif di Kota Medan.

1. Perencanaan dalam pembangunan dengan konsep partisipatif di Kota Medan. Pemaparan dalam pembahasan ini mengenai hasil analisis yang telah dihimpun dari data yang diperoleh secara beruntun pada kajian analisis. Analisis yang dikembangkan didasarkan pada teori perencanaan pembangunan dengan konsep partisipatif yang dipopulerkan oleh McGee dengan pemaparan yang dibagi dalam beberapa dimensi. Beberapa dimensi tersebut antara lain *actors*, *knowledge* dan *spaces*.
2. Factor yang mendukung serta menghambat dari realisasi perencanaan pembangunan dengan konsep partisipatif di Kota Medan. Proses yang dilakukan dengan melalui perencanaan panjang dalam tahapan pembangunan di Kota Medan ini telah dipertimbangkan dengan berbagai unsur yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Disini, penulis telah melakukan analisa lebih mendalam dan menemukan beberapa factor yang akan mendukung serta menghambat realisasi dari pelaksanaan perencanaan pembangunan dengan konsep partisipatif di Kota Medan. Factor yang diindikasikan akan mendukung dari proses perencanaan pembangunan ini

utamanya adalah munculnya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung berbagai tindakan pemerintahan dengan merepresentasikan ekspresi serta tindakan manusia yang dengan serta merta terlibat pada kebutuhan pemerintah. Wujud dari dukungan tersebut ditengarai mendapat dorongan dari adanya tiga factor yang secara totalitas mendukung berupa unsur *actors*, *knowledge* serta *spaces*. Keinginan utama dari individu masing-masing masyarakat menjadi salah satu pemantik terbesar keikutsertaannya dalam menjadikan sebuah pembangunan semakin terealisasi dengan baik. Disisi lain, terdapat factor yang menghambat dari realisasi perencanaan pembangunan dengan konsep partisipatif di Kota Medan yang didorong dari kemunculan sebuah permasalahan yang berasal dari individual masing-masing seperti ketergantungan. Sikap ketergantungan yang diperlihatkan oleh masyarakat terhadap entitas pemerintahan ketika menjalankan sebuah kegiatan dengan orientasi rencana pembangunan mampu menghambat sebuah rencana yang sebelumnya sudah dipertimbangkan dengan baik. Secara rinci, berikut factor pendukung dari kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam menghadapi perencanaan pembangunan secara partisipatif di Kota Medan. Beberapa factor pendukung tersebut antara lain adanya dorongan dari pemerintah hingga munculnya koordinasi yang relevan dengan kelembagaan serta keinginan masyarakat yang murni ingin maju dalam sector pembangunan perekonomian.

Disisi lain, factor penghambat yang telah ditemukan dalam kajian topik permasalahan ini berhubungan dengan factor internal dan factor eksternal yang mendukung adanya kemunduran atau kemacetan dalam rencana pembangunan perekonomian dengan konsep partisipatif di Kota Medan. Berikut pemaparan mengenai factor penghambat yang ada dalam topik perencanaan pembangunan di Kota Medan.

Factor internal

Dalam permasalahan ini berikut pemaparan factor internal yang mendukung hambatan dalam partisipasi masyarakat ketika proses perencanaan pembangunan akan dilakukan di Kota Medan

- a. Terbatasnya Wawasan serta Pengetahuan Masyarakat pada Rencana Pembangunan Perekonomian Tersebut. Analisis yang telah dilakukan dan diklasifikasikan pada factor internal mendukung hambatan yang sesuai dengan partisipasi masyarakat pada keikutsertaan di proses perencanaan pembangunan. Hal ini dibuktikan dengan adanya batasan wawasan masyarakat yang dipicu oleh rendahnya pendidikan serta kurangnya keingintahuan masyarakat pada procedural rencana pembangunan perekonomian. Masyarakat juga belum menyadari sepenuhnya mengenai peran yang optimal seorang masyarakat dalam sebuah pembangunan perekonomian wilayahnya. Optimalisasi ini menjadi hambatan yang berarti dan dianggap sebagai proses yang tidak berdampak banyak bagi kehidupan masyarakat karena secara garis besar dilihat sebagai kesempatan bagi pemerintah untuk melaksanakan kewajiban dan haknya. Disisi lain, fakta yang mendukung hal ini dapat dilakukan dengan peran aktif masyarakat pada proses perencanaan pembangunan dikarenakan kebutuhan tujuan masyarakat dalam perencanaan pembangunan. Keikutsertaan masyarakat juga menjadi jembatan yang efektif dalam merealisasikan hal tersebut.
- b. Masyarakat Memiliki Kepedulian yang Rendah dalam Menjalankan Perencanaan Pembangunan. Sebuah kelompok masyarakat kurang memahami mengenai kendala maupun hambatan yang timbul pada pemikiran masyarakat. Selain itu, sebuah kegiatan perencanaan dalam pembangunan melalui berbagai proses yang disertakan dalam sebuah perencanaan tahunan yang didukung dengan adanya formalitas tiap tahunnya. Kesiapan masyarakat dalam hal ini juga masih terkendala pada waktu sehingga hanya terbatas dalam menyalurkan sebuah aspirasi.

Faktor Eksternal

Dalam factor eksternal terdapat sebuah hambatan yang muncul dari luar masyarakat dan didukung dengan adanya partisipasi yang rendah dalam diri masyarakat. Berikut beberapa uraian mengenai hambatan dalam factor eksternal, antara lain:

- Keadaan Geografis Sebuah Wilayah. Di Provinsi Sumatera sendiri yang merupakan provinsi terletak di Pulau Sumatera, memiliki pusat pemerintahan yakni Kota Medan. Di Kota Medan sendiri masih banyak pedalaman desa yang sangat sedikit pada kebutuhan transportasi hingga perbaikan infrastruktur.
- Rendahnya Kuantitas Pegawai. Bappeda menjadi salah satu instansi pemerintah yang memiliki kompetensi dengan klasifikasi tinggi. Namun apabila sebuah instansi memiliki sisi lain yang rendah juga akan berpengaruh pada kinerja Bappeda. Kompetensi di wilayah ranah kecamatan dan desa juga akan menyumbangkan hambatan ini.

Berikut beberapa data analisis yang dipergunakan dalam penelitian:

Tabel 2. Angka Proyeksi Indikator Makro Ekonomi Dan Indikator Kesejahteraan Sosial Kota Medan Tahun 2010 – 2025

No	Uraian	Satuan	Perkiraan			
			2010	2015	2020	2025
A.	INDIKATOR MAKRO KESEJAHTERAAN SOSIAL					
1	Jumlah Penduduk Tengah Tahun	Ribu jiwa	2.202,06	2.337,26	2,474,47	2.607.67
2	Pertumbuhan Penduduk	Persen	1,29	1,11	1,03	0,94
3	Luas Wilayah	Km2	265,10	265,10	265,10	265,10
4	Kepadatan Penduduk	Jiwa/km2	8.306,51	8,816,53	9,326.54	9,836,56
5	APS					
	- 7-12	persen	98,83	99,19	99,55	99,91
	- 13-15	persen	95,52	96,74	97,99	99,17
	- 16-18	Persen	81,78	86,00	90,23	94,46
	- 19-24	persen	38,72	44,00	59,29	54,56
6	Umur Harapan Hidup	Tahun	72,92	74,58	76,23	77,89
7	Angka Kelahiran Kasar	Rata2 kelahiran PUS	2,09	1,89	1,69	1,48
8	Angka Kematian Kasar	per 1000 pddk	2,17	1,62	1,06	0,51
9	Angka Kematian Bayi	per 1000 kelahiran hidup	14,38	12,09	9,80	7,52
No	Uraian	Satuan	Perkiraan			

			2010	2015	2020	2025
10	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	103.10	94.38	85.67	76.95
11	Angka Kesakitan Umum	persen	10.76	9,70	8.65	7.60
12	TPAK	persen	56.91	58.14	61.87	65.60
13	Pengangguran Terbuka	persen	9.80	8.80	7.8-	6.80
14	IPM	-	76,81	78,38	79.90	81.44
15	Penduduk Miskin	persen	6.49	5.74	4.99	4.24
16	Gini Ratio	-	0.26	0.25	0.24	0.22
17	Rata-rata lama sekolah	Tahun	11.84	12.84	13.84	14.84
B.	INDIKATOR MAKRO EKONOMI					
1	PDRB AD Harga Berlaku	Rp Triliyun	63.01	84.58	106.16	127.74
2	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	8.13	8.72	9.30	9.88
3	PDRB Per-Kapita ADH Berlaku	Rp Jutaan	28.61	36.19	42.94	48.99
4	Inflasi	persen	5.56	5.03	4.50	3.96
5	Export	Nilai FOB, 000 US \$	4.723.147	6.248.697	7.774.247	9.299.797
6	Import	Nilai CIF, 000 US \$	1.563.172	2.081.532	2.599.892	3.118.252
7	Perkiraan Investasi	Rp Triliyun	9.35	12.81	16.27	10.73
8	APBD	milyar (rp)	2.152,64	2.752,39	3.352,13	3,915.87
9	PAD	milyar (rp)	477,99	663.71	849,42	1.035.13

(Sumber: Pemko Medan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) TAHUN 2006 – 2025)

Berdasarkan Tabel diatas dua sub bab bagian indikator, yaitu Indikator Makro Kesejahteraan Sosial dan Indikator Makro Ekonomi. Indikator yang pertama, mempunyai 17 indikator. sedangkan indikator yang kedua mempunyai 9 indikator. Biasanya tiap tiap indikator mempunyai peran penting

dalam perencanaan pembangunan di kota medan. Pembangunan di Kota Medan tersebut memiliki berbagai variasi dan unik. Pada setiap indikator memiliki peran penting juga dalam merencanakan pembangunan di kota medan. pada tabel diatas, bahwa indikator Makro kesejahteraan pada sub bab bagian ini semakin lama semakin naik, dan semakin berkembang pada tiap-tiap indikator tersebut. kemudian, pada indikator makro ekonomi, juga dilihat berdasarkan data ini semakin lama semakin naik, dan semakin lama juga pertumbuhan ekonomi semakin menanjak pada tiap tahunnya.

Dari data yang peneliti ambil untuk melihat apa saja yang mempengaruhi dalam perencanaan pembangunan terdapat 2 indikator. Indikator tersebut dapat dikategorikan pada beberapa subbab yakni makro kesejahteraan sosial yang dibagi lagi dalam jumlah penduduk hingga demografi penduduk serta harapan hidup dan usia dan pertumbuhan penduduk. Dari beberapa faktor tersebut menentukan bagaimana dalam perencanaan pembangunan kedepannya. Dimana dengan angka pada data tersebut, menjadi patokan dalam menyusun rencana. Dan didukung oleh indikator makro ekonomi, yang dimana berisi tentang PDRB, pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, ekspor dan impor, angka investasi, APBD, serta PAD. Dari bantuan data makro ekonomi ini pula berperan dalam pemerintah merencanakan pembangunan. Dengan data makro ekonomi ini pula dapat diketahui anggaran yang dapat direncanakan yang kemudian akan dikeluarkan.

Dalam perencanaan pembangunan, Kota Medan memiliki tantangan dengan harus menangani daerah seluas 265,10 km², dengan perkiraan kepadatan penduduk sebanyak 9.836,56 jiwa/km² pada tahun 2025. Pertambahan jumlah penduduk ini dapat menjadi hambatan dalam menangani perencanaan pembangunan, namun ini juga menjadi peluang jika pemerintah dapat memanfaatkan pertumbuhan penduduk ini. Untuk pertumbuhan penduduk sendiri pada tahun 2025 terjadi penurunan, yang dimana pada tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan sebesar 1,03 menjadi 0,94 % pada tahun 2025. Maka dari beberapa faktor yang telah disajikan pada data di atas menunjukkan dibutuhkan beberapa faktor dalam menyusun perencanaan pembangunan. Dimana dalam perencanaan pembangunan ini mencoba memenuhi apa yang menjadi kebutuhan daerahnya. Maka akan mengikuti seberapa besar jumlah penduduk, sudah sejauh apa tingkatan IPM di daerah tersebut sehingga dapat menarik bantuan investor dalam merencanakan pembangunan dengan menyediakan modal baik itu seperti penyediaan tempat industri sehingga dapat menyerap tenaga kerja. Maka dari itu dapat mengurangi beban pemerintah sendiri dalam perencanaan pembangunan.

KESIMPULAN

Dalam kegiatan perencanaan pembangunan yang memiliki tujuan dalam analisa sebuah proses dengan penyebab utama adalah pertimbangan dari regenerasi ciri-ciri yang penting dalam pola lingkup kemasyarakatan. Hal ini berhubungan dengan adanya perubahan yang meningkatkan pada sisi pola pikir hingga kemajuan teknologi serta berbagai pertimbangan yang berhubungan dengan instansi. Pembangunan dalam sector perekonomian dipahami sebagai proses panjang yang memicu adanya GNP perkapita atau *Gross National Product* atau pendapatan perkapita masyarakat pada sebuah periode tertentu. Umumnya, pusat pemerintahan menjadi salah satu kunci dalam menjalankan sistem pemerintahan yang menjadi kunci realisasi perkembangan dan kemajuan sebuah wilayah. Berikut beberapa kunci utama dalam proses hambatan perencanaan pembangunan dalam sector perekonomian dengan konsep partisipatif:

- a) Adanya perkembangan penduduk
- b) Sistem perekonomian yang memiliki konsep dualistic
- c) Rendahnya tingkat pembentukan dalam modal

- d) Kegiatan ekspor berorientasi pada bahan
- e) Adanya proses maupun sebab yang bersifat kumulatif

Kendala yang dirasakan oleh beberapa pihak dalam implementasi perencanaan pembangunan yang ditargetkan dapat diimplementasikan di Kota Medan ini ditengarai dengan perencanaan pembangunan secara partisipatif Kota Medan. Analisis yang telah diperoleh dari beberapa informasi mengenai fenomena perencanaan pembangunan di Kota Medan ini terdapat Analisis yang dikembangkan didasarkan pada teori perencanaan pembangunan dengan konsep partisipatif yang dipopulerkan oleh McGee dengan pemaparan yang dibagi dalam beberapa dimensi. Beberapa dimensi tersebut antara lain *actors*, *knowledge* dan *spaces*. Factor yang diindikasikan akan mendukung dari proses perencanaan pembangunan ini utamanya adalah munculnya keikutsertaan masyarakat dalam mendukung berbagai tindakan pemerintahan dengan merepresentasikan ekspresi serta tindakan manusia yang dengan serta merta terlibat pada kebutuhan pemerintah. Keinginan utama dari individu masing-masing masyarakat menjadi salah satu pemantik terbesar keikutsertaannya dalam menjadikan sebuah pembangunan semakin terealisasi dengan baik. Disisi lain, terdapat factor yang menghambat dari realisasi perencanaan pembangunan dengan konsep partisipatif di Kota Medan yang didorong dari kemunculan sebuah permasalahan yang berasal dari individual masing-masing seperti ketergantungan. Ditegaskan kembali bahwa factor yang mendukung dalam proses perencanaan pembangunan sebuah masyarakat diadaptasi dari beberapa fenomena utama seperti adanya keinginan yang kuat dalam diri masyarakat untuk mengembangkan sebuah konsepsi yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan. Kota Medan sendiri menjadi salah satu wilayah yang memiliki sumbangsih besar dalam menambah relevansi kemampuan masyarakat untuk meningkatkan perencanaan pembangunan yang ideal dan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Frisdiantara Christea, 2016, *Ekonomi Pembangunan sebuah kajian Teoritis dan Empiris*, Malang, Katalog dalam terbitan
- Kartasasmita Ginanjar. 1996. *Pembangunan untuk Rakyat Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*. PT. Pustaka Cidesindo ; Jakarta
- Mahi Ali Kabul, dkk, 2017, *Perencanaan Pembangunan daerah (teori dan aplikasi)*, Jakarta, Kencana
- Nehen, I Ketut, 2010. *Perekonomian Indonesia*. Diktat Kuliah pada Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali.
- Purba Bonaraja, dkk, 2021, *Ekonomi Pembangunan*, Yayasan Kita Menulis
- Rapanna Patta, dkk, 2017, *Ekonomi Pembangunan*, Makassar, Sah Media
- Sumber data Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP). 2006 – 2025. <https://pemkomedan.go.id/RADPPK/RPJPD-Kota-Medan.pdf>
- Sumber data Badan Pusat Statistika . 2022. *Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ inflasi kota medan 2022*. <https://www.bps.go.id/subject/3/inflasi.html>
- Todaro P. Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga Jilid I*, Jakarta Penerbit : Erlangga
- Todaro P. Michael., & Stephen, S. (2004). *Pembangunan Ekonomi Dunia Kesembilan*. Jakarta Penerbit : Erlangga
- Sugiyono. (2015). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.

Sirojuzilam, 2008. Disparitas Ekonomi dan Perencanaan Regional, Ketimpangan Ekonomi Wilayah Barat dan Wilayah Timur Provinsi Sumatera Utara. Pustaka Bangsa Press